

**ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kuningan)

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Bidang Studi Akuntansi**



Oleh :

Paulina Ika Kartika Dewi

022114036

**Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2006**

SKRIPSI

ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kuningan)

Oleh:
Paulina Ika Kartika Dewi
022114036

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.

Tanggal, 12 Oktober 2006

Pembimbing II



Dr. Fr. Ninik Yudianti, M. Acc.

Tanggal, 6 November 2006

SKRIPSI

ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kuningan)

Dipersiapkan dan Ditulis Oleh:

Paulina Ika Kartika Dewi
022114036

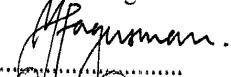

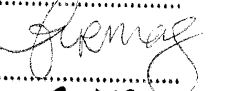
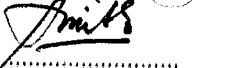
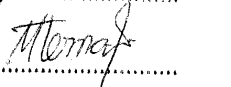
Telah Dipertahankan Didepan Panitia Penguji
Pada Tanggal 15 Desember 2006
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Ketua : Dra. YFM. Gien A, M.M., Akt.
Sekretaris : Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.
Anggota : Firma Sulistiyowati, S.E., Msi.
Anggota : Dr. Fr. Ninik Yudianti, M. Acc.
Anggota : M.T. Ernawati, S.E, M.A.

Tanda Tangan

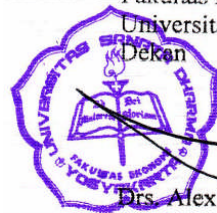

.....

.....

.....

.....

.....


Yogyakarta, 22 Desember 2006

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan




Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.

MOTTO dan PERSEMBAHAN

**...tidak ada kasih
yang lebih besar
daripada kasih seorang
yang memberikan nyawanya
untuk sahabat-sahabatnya... (Yoh 15: 9)**


Skripsi ini kupersembahkan kepada:
Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria
Bapakku Heribertus Sudarta
Ibuku Lucia Karminah
Kedua adikku: Ria dan Bambang
Kekasihku Krisna, dan
Sahabat-sahabatku Acied, Riezka, Mimie...

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 22 Desember 2006

Penulis



Paulina Ika Kartika Dewi

ABSTRAKSI

ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kuningan

Paulina Ika Kartika Dewi
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2006

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui tingkat kemandirian Daerah apabila didanai oleh PAD. (2) Mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan PAD. (3) Mengetahui indeks kemampuan rutin daerah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Kuningan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah menghitung besarnya rasio kemandirian, rasio efisiensi dan efektivitas, serta indeks kemampuan rutin daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Rasio kemandirian daerah Kabupaten Kuningan yang diukur melalui PAD, hanya mencapai rata-rata sebesar 5,26% untuk setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kuningan tidak mampu menjalankan otonomi daerah. (2) Rasio Efisiensi pemungutan PAD mencapai rata-rata 4,17% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan PAD sudah efisien. Sedangkan rasio Efektivitas pemungutan PAD mencapai 103,21%, yaitu menunjukkan bahwa pemungutan PAD sudah sangat efektif. (3) Indeks Kemampuan Rutin Daerah hanya mencapai rata-rata 7,40% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan Kabupaten Kuningan pada Pusat.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF REGIONAL ORIGINAL REVENUE'S (PAD's) ABILITY IN SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL AUTONOMY

A case study in Kuningan Regency Government

Paulina Ika Kartika Dewi
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2006

This research aimed at : (1) knowing the level of regional's self - sufficiency if it was financed with PAD (2) knowing the level of efficiency and effectiveness of PAD revenue(3) knowing the level of region's routine ability index.

This research was a case study at the government of Kuningan regency. In order to collect the data, the researcher used documentation and interview techniques. In the data analysis, the researcher used independence ratio, ratio of efficiency and effectiveness and also calculated the region's routine ability index.

The result of this research showed that : (1) the ratio of independence of Kuningan regency measured with PAD on the average, it only reached 5,26% for every year. This matter indicated that the Kuningan regency was unable to run the regional autonomy (2) the ratio of efficiency of PAD collection reached the mean of 4,17% yearly. This matter indicated that the collection of PAD was already efficient. While the ratio of effectiveness of PAD collection reached 103,21%. That's indicated that the collection of PAD was very effective (3) the region's routine ability index only reached the mean of 7,40% for every year. This matter indicated the high dependency of Kuningan regency on central government.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Bapa di Surga atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari pihak lain, skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Dr. Ir. P. Wiryono P., S.J. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma
2. Drs. Alex Kahu Lantum, M.S. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma
3. Ir. Drs. Hansiadi Y.H, M.Si., Akt. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma
4. Firma Sulistiyowati, S.E., MSi. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh perhatian dan kesabaran senantiasa memberikan nasihat dan dorongan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
5. Dr. Fr. Ninik Yudianti, M. Acc. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh perhatian dan kesabaran senantiasa memberikan nasihat dan dorongan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.

6. Seluruh karyawan Bapeda yang dengan sabar membantu penulis dalam proses pencarian data, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Pak Uka Sukari dan seluruh karyawan Dipenda yang dengan sabar membantu penulis dalam proses pencarian data, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
8. Bapakku H. Sudarta dan Ibuku Lucia K yang sangat kucintai....yang dengan sabar, penuh perhatian dan cinta telah mendidik dan mendukungku, terimakasih yang tak terhingga atas segala doa, kasih sayang dan pengertian yang selalu ada untukku.
9. Kedua adikku Ria dan Bambang yang selalu memberikan doa dan dukungan buat tetehmu ini. Makasih ya sabar nunggu aku lulus.
10. Xna... *kekasihku*, terimakasih menjadi motivasi terbesar buatku, sabar banget menghadapi aku, setia dengerin keluh kesahku (terlebih selama skripsi ini) dan selalu mendukung ku.
11. Mang Ganda, Bi Nining dan Dede Ari...terimakasih memperbolehkan aku menginap, membantu proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas perhatian dan kesabarannya.
12. Pak Diding sekeluarga yang telah banyak membantu, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
13. Keluarga besarku di Kuningan dan di Yogyakarta yang telah banyak memberi dukungan, doa dan perhatian selama aku berada di Yogyakarta.

14. Acied, Mimie, Rizka...*sahabat-sahabatku*, terimakasih atas persahabatan, cinta dan dukungan yang kalian berikan selama ini. Terimakasih juga atas perhatian dan bantuannya selama skripsi ini. Kalian sahabat terbaikku yang membuat hidupku penuh warna..
15. Merry..., makasih ya jadi sahabat seumur hidupku. Persahabatan terindah yang pernah kumiliki. Terimakasih selalu mengejekku karena nggak lulus-lulus, itu jadi motivasi besar buatku.
16. Ayonk.. Makasih ya.. jadi sahabat, ade, saudara buat aku. Makasih buat semua dukungannya ya.. Setia banget ngucapin 'Ayo Teh, jangan nyerah, katanya pengen cepet lulus!' Terimakasih ya atas semua semangatnya..
17. Anak-anak Gryffindor: Potter, Rio, Danu...Terimakasih jadi bagian dari hari-hariku, dengerin curhatku, dan buatku selalu tertawa. Terimakasih juga atas semua pengertiannya selama pembuatan skripsi ini.
18. Teman-temanku MPT: Sapi, Toink, Mba Ani, Mba Magda, Mba Yani, Frans, Sigit, Alfons, Wawan, Santi, Feri, Upi dan Mba Heni kapan ya kita ketemu lagi!!
19. Teman-temanku: Komeng, Gagat, Katre & Mita, Silvy & Radix, Wamby, Leo, Felix, Dian, Me2, Harto, Novi, Ndari, Dian, Edo, Beni n semua anak kelas A'02. Makasih ya selalu nanyain kapan aku lulus.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran yang dapat membantu sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi.

Yogyakarta,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II. LANDASAN TEORI	7
A. Konsep Otonomi Daerah di Indonesia	7
B. Pengertian Otonomi Daerah.....	7

C. Prinsip Otonomi Daerah.....	9
D. Sumber-sumber Penerimaan Daerah.....	10
E. Keuangan Daerah	15
F. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah	16
G. Efisiensi dan Efektivitas.....	18
H. Kemampuan Rutin Daerah.....	19
BAB III. METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Waktu dan Tempat Penelitian	21
C. Subyek dan Obyek Penelitian	21
D. Data yang diperlukan	22
E. Teknik Pengumpulan Data.....	22
F. Teknik Analisis Data.....	22
BAB IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN	26
A. Sejarah Kabupaten Kuningan.....	26
B. Keadaan Geografis	29
C. Iklim dan Hidrologi.....	29
D. Keadaan Penduduk.....	30
E. Sosial	33
F. Industri	36
G. Keuangan.....	37
BAB V. DESKRIPSI, ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Deskripsi Data.....	38

B. Analisis Data dan Pembahasan	38
BAB VI. PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Keterbatasan Penelitian	54
C. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	17
Tabel II.2	Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan efisiensi.....	18
Tabel II.3	Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan efektivitas	18
Tabel IV.1	Kepadatan Penduduk Kabupaten Kuningan Menurut Jumlah Penduduk dan Luas Kecamatan	31
Tabel IV.2	Urutan Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Kuningan	36
Tabel IV.3	Jumlah Sarana Peribadatan di Kabupaten Kuningan	36
Tabel V.1	Realisasi PAD dan TPD Kabupaten Kuningan Tahun 2001-2005	39
Tabel V.2	Kontribusi PAD terhadap TPD Kabupaten Kuningan Tahun 2001-2005	41
Tabel V.3	Realisasi PAD dan Biaya Pemungutan PAD Kabupaten Kuningan Tahun 2001-2005	42
Tabel V.4	Rasio Efisiensi Pemungutan PAD Kabupaten Kuningan Tahun 2001-2005	44
Tabel V.5	Realisasi dan Target PAD Kabupaten Kuningan Tahun 2001-2005	45
Tabel V.6	Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Kuningan Tahun 2001-2005	47
Tabel V.7	Realisasi PAD dan PRD kabupaten Kuningan Tahun 2001-2005	50
Tabel V.8	Kontribusi PAD terhadap PRD Kabupaten Kuningan Tahun 2001-2005	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Tabel Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Kuningan	
	Tahun 2001-2005	58
Lampiran II	Tabel Realisasi Total Penerimaan Daerah Kabupaten Kuningan	
	Tahun 2001-2005	59
Lampiran III	Tabel Target Penerimaan PAD Kabupaten Kuningan	
	Tahun 2001-2005	61
Lampiran IV	Tabel Biaya Pemungutan PAD Kabupaten Kuningan	
	Tahun 2001-2005	62
Lampiran V	Tabel Pengeluaran Rutin Daerah Kabupaten Kuningan	
	Tahun 2001-2005	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004, maka mulailah diberlakukannya Otonomi Daerah yaitu memberikan wewenang yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kecuali bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan, Peradilan, Fiskal Nasional, Moneter dan Agama.

Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan bagi Pemerintah Daerah dari fase sentralisasi menuju fase desentralisasi dengan harapan agar tingkat kemandirian daerah dapat meningkat. Kemandirian daerah harus didukung oleh kemampuan daerah tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya terutama dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena PAD merupakan sumber utama dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemandirian suatu wilayah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Semakin besar PAD suatu daerah dibandingkan dengan

bantuan dan pinjaman yang diterimanya berarti semakin mandiri daerah tersebut serta mampu melaksanakan pembangunan daerah.

Besar kecilnya kemampuan PAD juga bisa dilihat dari kemampuan rutin daerah yaitu besarnya PAD dalam membiayai pengeluaran rutin daerahnya. Semakin besar PAD berarti daerah tersebut makin mampu untuk melaksanakan otonomi daerahnya.

Akan tetapi di lain pihak hal ini menimbulkan dampak negatif bagi Pemerintah Daerah khususnya bagi daerah yang miskin sumber dayanya ataupun daerah yang kurang mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Mereka cemas dan khawatir tidak dapat melangsungkan pemerintahan daerahnya karena terbatasnya sumber dana yang dimiliki untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan.

Sebagian besar daerah di Indonesia memiliki permasalahan yang hampir sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, yaitu rendahnya peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan desentralisasi. Oleh karena itu, kinerja Pemerintah Daerah dalam memungut PAD juga menjadi faktor yang sangat penting. Sehingga, PAD yang terbatas tersebut dapat diperoleh seefisien dan seefektif mungkin.

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan analisis kemampuan PAD seperti yang dilakukan oleh Debby Maria Longdong dan Muhammad Yulianto. Longdong (2004) meneliti kemampuan keuangan

daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, studi kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Sleman belum cukup kuat untuk mendukung otonomi daerah, hal ini disebabkan karena kecilnya PAD jika dibandingkan dengan belanja daerah yang sangat besar. Sedangkan Yulianto (2001) meneliti tentang peranan PAD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di kota Yogyakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PAD kota Yogyakarta dikatakan cukup mandiri dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dan juga kinerja pemerintahan kota Yogyakarta sangat efisien dan efektif.

Perbedaan antara kedua penelitian tersebut adalah besar kecilnya PAD dalam melaksanakan otonomi daerah. Sehingga untuk mengetahui tingkat kemandirian dan kemampuan PAD dalam membiayai daerahnya, setiap daerah harus mengetahui seberapa besar PAD daerahnya masing-masing. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis seberapa jauh tingkat kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah agar Pemerintah Daerah dapat lebih berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya sehingga pembangunan dan pelayanan publik dapat lebih meningkat.

B. Rumusan Masalah

1. Berapa rata-rata tingkat kemandirian daerah apabila didanai oleh Pendapatan Asli Daerah?

2. Berapa rata-rata efisiensi dan efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah ?
3. Berapa rata-rata indeks kemampuan rutin daerah?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan dan dibatasi pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah untuk tahun 2001-2005 di Pemerintah Kabupaten Kuningan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui rata-rata tingkat kemandirian Daerah apabila didanai oleh Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui rata-rata tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk mengetahui rata-rata Indeks Kemampuan Rutin Daerah.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kemampuan daerah dalam menghadapi otonomi daerah sehingga daerah dapat lebih meningkatkan PAD.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan dan memberi masukan bagi pihak-pihak yang berminat dengan topik otonomi daerah.

3. Bagi Penulis

Mendapatkan pengetahuan dibidang keuangan daerah dan mendapatkan kesempatan untuk menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah ke dalam praktek sesungguhnya.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang teori-teori dan studi pustaka yang dijadikan dasar dalam mengolah data-data yang berkaitan dengan kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Kuningan.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini meliputi penjelasan mengenai jenis penelitian yang berupa studi kasus pada pemerintah Kabupaten Kuningan, waktu

penelitian, subyek dan obyek penelitian kemudian teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Kuningan

Bab ini menjelaskan tentang keadaan geografis, iklim dan hidrologi, keadaan penduduk, sosial dan industri serta keuangan Kabupaten Kuningan.

Bab V Deskripsi, Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil dari penelitian dan juga analisis data serta pembahasannya

Bab VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang ada, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi semua pihak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Otonomi Daerah di Indonesia

Pelaksanaan Otonomi Daerah sebenarnya sudah dicanangkan sejak dahulu seperti dirumuskan dalam UUD1945 pasal 18 yang menyatakan “bahwa daerah di Indonesia dibagi dalam daerah besar yakni Propinsi, dan Propinsi dibagi dalam daerah kecil yang bersifat otonom dan atau administrasi belaka.” Tetapi kemudian mengalami berbagai perubahan dalam tata cara pelaksanaannya sesuai dengan kondisi masyarakat pada waktu itu.

Dasar hukum yang digunakan sekarang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun1999.

B. Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *auto* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti undang-undang, hukum atau peraturan. Apabila diartikan secara harfiah otonomi adalah peraturan sendiri atau mengatur diri sendiri. Sedangkan menurut UU nomor 32 tahun 2004 otonomi daerah adalah:

“Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.”

Sedangkan daerah otonom adalah:

“Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2002: 59) tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu :

1. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
2. menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
3. memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Sedangkan sasaran otonomi daerah bagi kabupaten yang akan diteliti yaitu Kabupaten Kuningan adalah untuk memajukan perekonomian daerah dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kuningan.

C. Prinsip Otonomi Daerah

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 merumuskan bahwa daerah melaksanakan otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, hasil Amandemen Tahun 2000, yaitu Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Jadi prinsip yang dianut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 adalah :

1. Otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab.

Seluas-luasnya berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, fiskal nasional, moneter dan agama. Daerah memiliki kewenangan membentuk kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat

yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Nyata berarti daerah telah memiliki potensi untuk merealisasikan isi dan jenis otonomi yang dilimpahkan. Sedangkan bertanggung jawab berarti otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.

2. Penyelenggaraan otonomi yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, menjamin hubungan serasi antar daerah, dan menjamin hubungan serasi daerah dengan pemerintah.

D. Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah ini berasal dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain (Kaho, 1998: 68).

Adapun yang termasuk Pendapatan Asli Daerah adalah :

1) Hasil Pajak Daerah

Dasar hukum dari pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Yang dimaksud dengan pajak daerah adalah:

“Turan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”

Pajak daerah ini terdiri dari :

(a). Pajak Daerah yang dipungut daerah tingkat I (Propinsi)

terbagi atas :

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- (2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- (3) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

(b). Pajak Daerah yang dipungut daerah tingkat II (Kabupaten/ Kota)

terbagi atas :

- (1) Pajak Hotel

- (2) Pajak Restoran
- (3) Pajak Hiburan
- (4) Pajak Reklame
- (5) Pajak Penerangan Jalan
- (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- (7) Pajak Parkir

2) Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan.

3) Hasil Pengelolaan kekayaan-kekayaan daerah yang dipisahkan

Penerimaan dari pengelolaan kekayaan ini antara lain bagian laba, deviden, penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan penjualan saham milik Negara.

4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Yang termasuk lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

b. Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dimaksud dengan dana perimbangan adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.”

Tujuan dari dana perimbangan adalah membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, dan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Dana Perimbangan terdiri dari :

- 1) Dana Bagi Hasil, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase tertentu. Dana Bagi Hasil terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) dan sumber daya alam
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah melalui formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil, akan memperoleh dana Alokasi Umum relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum relatif besar.

- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan.

c. Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Dana Darurat. Pendapatan Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah Negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk

devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan pendapatan Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan atau krisis solvabilitas.

2. Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari :

- a. sisa lebih perhitungan anggaran Daerah
- b. penerimaan pinjaman Daerah
- c. dana cadangan Daerah
- d. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

E. Keuangan Daerah

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, keuangan daerah adalah:

“semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

Keuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan kemasyarakatan di daerah khususnya PAD sebagai sumber utama keuangan daerah, oleh karena itu kinerja pengelolaan keuangan daerah

diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna (efisiensi) dan berhasil guna (efektivitas).

Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah dapat diringkas sebagai berikut : (Binder, 1989: 279)

1. tanggung jawab
2. memenuhi kewajiban keuangan
3. kejujuran
4. hasil guna dan daya guna dan
5. pengendalian

F. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Daerah dikatakan mampu melaksanakan otonomi apabila tingkat ketergantungan Daerah terhadap Pusat sangat rendah atau PAD menjadi sumber keuangan yang terbesar. Rasio kemandirian atau perbandingan antara PAD dengan TPD merupakan salah satu indikator kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Hasil yang diperoleh akan menunjukkan bagaimana tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Ada empat macam pola hubungan yang memperkenalkan “hubungan situasional” yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2004: 188-189) yaitu :

1. pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
2. pola hubungan konsultatif dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sudah lebih mampu dalam melaksanakan otonomi.
3. pola hubungan partisipatif dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi
4. pola hubungan delegatif dimana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah sudah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah

Adapun tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman untuk melihat pola hubungan dan tingkat kemampuan keuangan daerah yaitu :

Tabel II.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Halim, 2004: 188

G. Efisiensi dan Efektivitas

1. Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2002: 232) efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.

Menurut Halim (2004: 285) efisiensi PAD menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Adapun tolak ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi tersebut yaitu:

Tabel II.2
Pedoman Penilaian dan kinerja keuangan

	Efisiensi
>100%	Tidak efisien
90-100%	Kurang efisien
80-90%	Cukup efisien
60-80%	Efisien
<60%	Sangat efisien

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

2. Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2002: 232) efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Menurut Halim (2004: 285) efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Adapun tolak ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas tersebut yaitu:

Tabel II.3
Pedoman Penilaian dan kinerja keuangan

	Efektivitas
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber : *Keppmendagri No. 690.900.327 tahun 1996*

H. Kemampuan Rutin Daerah

Kebijakan anggaran pada dasarnya selalu diusahakan agar PAD dapat membiayai seluruh pengeluaran rutin daerah tersebut, sisanya diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan (biaya pembangunan). Karena itu, salah satu indikator kemampuan PAD dalam melaksanakan otonomi juga dapat dilihat dari Indeks Kemampuan Rutin Daerah (IKRD), yang diperoleh dari besarnya PAD terhadap PRD dalam prosentase pada tahun yang sama. Untuk dapat melaksanakan Otonomi Daerah, PAD diharapkan mampu membiayai seluruh pengeluaran rutin daerah. Karena apabila

PRD saja tidak dapat tercukupi, bagaimana dengan pengeluaran pembangunan? Semakin besar PAD terhadap PRD, maka daerah tersebut semakin mampu melaksanakan otonomi daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi kasus yaitu penelitian yang terbatas pada objek tertentu pada Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dianalisis serta selanjutnya ditarik kesimpulan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1 Tempat Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Kuningan

2. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan antara bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Juli 2006.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

- a DIPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) Kabupaten Kuningan
- b BPS Kabupaten Kuningan
- c BAPEDA (Badan Perencanaan Daerah) Kabupaten Kuningan

2. Obyek Penelitian adalah target dan realisasi PAD dan APBD

D. Data yang diperlukan

1. Gambaran umum pemerintah daerah kabupaten Kuningan
2. Target dan Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah
3. Realisasi APBD

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan
2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data keuangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

F. Teknik Analisis Data

1. Untuk menjawab permasalahan pertama digunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) (Reksohadiprojo, 2001: 155) yaitu

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Langkah-langkah untuk menghitung seberapa besar rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) adalah:

- a. Mengumpulkan data mengenai PAD dan TPD yang diperoleh dari Dipenda Kabupaten Kuningan tahun 2001-2005

- b. Melakukan analisis rasio kemandirian dengan cara membandingkan PAD dengan TPD per tahun dikalikan 100%

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

- c. Menarik Kesimpulan

Setelah menghitung rasio ini, dapat di ketahui bagaimana rata-rata tingkat kemandirian daerah dan pola hubungannya dengan pemerintah, apakah termasuk hubungan instruktif, konsultatif, partisipatif atau delegatif.

2. Untuk menjawab permasalahan kedua digunakan penghitungan Efisiensi dan Efektivitas dengan rumus (berdasarkan konsep PAU-SE UGM) seperti yang dikutip Halim (2004) sebagai berikut :

A. Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung seberapa efisiennya rata-rata pemungutan PAD:

- a. Mengumpulkan data mengenai PAD dan biaya pemungutan PAD yang diperoleh dari Dipenda Kabupaten Kuningan tahun 2001-2005
- b. Melakukan perhitungan rasio Efisiensi dengan cara membandingkan biaya pemungutan PAD dengan realisasi PAD pertahun dikalikan 100%

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

c. Menarik Kesimpulan

Setelah menghitung rasio ini dapat diketahui bagaimana rata-rata tingkat efisiensi pemungutan PAD Pemerintah Kabupaten Kuningan. Hasil yang diperoleh dapat diukur dengan menggunakan tolak ukur berdasarkan tabel II.2 Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik

B. Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

Langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung seberapa besar rata-rata efektivitas pemungutan PAD:

- a. Mengumpulkan data mengenai realisasi PAD dan target PAD yang diperoleh dari Dipenda Kabupaten Kuningan tahun 2001-2005
- b. Melakukan analisis rasio efektivitas dengan cara membandingkan realisasi PAD dengan target PAD pertahun dikalikan 100%

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

c. Menarik Kesimpulan

Setelah menghitung rasio ini dapat diketahui bagaimana rata-rata tingkat efektivitas pemungutan PAD Pemerintah

Kabupaten Kuningan. Hasil yang diperoleh dapat diukur dengan menggunakan tolak ukur berdasarkan tabel II.3. Semakin besar rasio efektivitas, maka kinerja Pemerintah daerah semakin baik.

3. Untuk menjawab permasalahan ketiga digunakan rasio indeks kemampuan rutin yaitu rasio besarnya PAD terhadap pengeluaran rutin daerah dalam persentase pada tahun tertentu tentang kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran rutinnya.

$$\text{IKRD} = \frac{\text{PAD}}{\text{PRD}} \times 100\%$$

Keterangan :

IKRD : Indeks Kemampuan Rutin Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PRD : Pengeluaran Rutin Daerah

Langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung seberapa besar rata-rata kontribusi PAD terhadap PRD yaitu:

- a. Mengumpulkan data mengenai PAD dan PRD yang diperoleh dari Bapeda Kabupaten Kuningan tahun 2001-2005
- b. Melakukan perhitungan IKRD dengan cara membandingkan PAD dengan PRD pertahun dikalikan 100%

$$\text{IKRD} = \frac{\text{PAD}}{\text{PRD}} \times 100\%$$

- c. Menarik Kesimpulan

Semakin besar PAD terhadap PRD maka daerah tersebut semakin mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

A. Sejarah Kabupaten Kuningan

Diperkirakan sekitar 3.500 tahun sebelum masehi sudah terdapat adanya kehidupan manusia, hal ini didasarkan kepada peninggalan yang ditemukan di Wilayah Kuningan. Salah satu bukti peninggalan tersebut terdapat di Kampung Cipari Kelurahan Cigugur yaitu pada tahun 1972 ditemukan peninggalan dengan identifikasi sebuah peti kubur batu, perkakas dari batu dan keramik. Diperkirakan pada masa itu terdapat pemukiman manusia yang telah memiliki kebudayaan tinggi. Suatu pemukiman masyarakat manusia tersebut baru terwujud dalam bentuk suatu kekuatan politik seperti halnya negara, sebagaimana dituturkan dalam cerita parahyangan dengan nama Kuningan.

Negara/Kerajaan Kuningan tersebut berdiri setelah dinobatkannya Seuweukarma sebagai Raja/Kepala pemerintahan yang kemudian bergelar Rahiyang Tangkuku atau Sang Kuku yang bersemayam di Arile atau Saunggalah. Seuweukarma menganut ajaran “Dangiang Kuning” dan berpegang kepada “Sanghiyang Dharma” (Ajaran Kitab Suci), serta “Sanghiyang Riksa” (sepuluh pedoman hidup). Ekspansi kekuasaan Kuningan pada jaman kekuasaan Seuweukarma menyeberang sampai negeri Melayu. Pada saat itu masyarakat Kuningan merasa hidup aman dan tentram di bawah pimpinan Seuweukarma yang bertahta sampai berusia

lanjut.

Perkembangan Kerajaan Kuningan selanjutnya seperti terputus, dan baru pada 1175 masehi muncul lagi. Kuningan pada waktu itu menganut agama Hindu di bawah pimpinan Rakean Darmariksa dan merupakan daerah otonom yang masuk wilayah Kerajaan Sunda yang terkenal dengan nama Pajajaran. Pada tahun 1389 masehi Cirebon masuk kekuasaan Kerajaan Pajajaran, namun pada abad ke-15 Cirebon sebagai Kerajaan Islam menyatakan kemerdekaannya dari Pakuan Pajajaran.

Pada tahun 1470 masehi seorang ulama besar agama Islam datang ke Cirebon yaitu Syeh Syarif Hidayatullah putra Syarif Abdullah dan Rara Santang atau Syarifah Mo'Daim yang merupakan putra Prabu Syarif Hidayatullah dan juga murid Sayid Rahmat yang lebih dikenal dengan nama Sunan Ngampel yang memimpin daerah Ampeldenta. Kemudian Syeh Syarif Hidayatullah ditugaskan oleh Sunan Ngampel untuk menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat, dan mula-mula tiba di Cirebon yang pada waktu itu Kepala Pemerintahan Cirebon dipegang oleh Haji Doel Iman. Pada waktu 1479 masehi Haji Doel Iman berkenan menyerah kepada syarif hidayatullah setelah menikah dengan putrinya. Karena terdorong oleh hasrat ingin menyebarkan agama Islam, pada tahun 1481 Masehi Syeh Syarif Hidayatullah berangkat ke daerah Luragung yang masuk wilayah Cirebon Selatan yang pada waktu itu dipimpin oleh KI Gedeng Luragung yang bersaudara dengan Ki Gedeng Kasamya dari Cirebon, selanjutnya Ki Gedeng Luragung memeluk agama

Islam.

Pada waktu Syeh Syarif Hidayatullah di Luragung, datanglah Ratu Ontin Nio istrinya dalam keadaan hamil dari negeri Cina (bergelar Ratu Rara Sumanding) ke Luragung, dari Ratu Ontin Nio alias Ratu Rara Sumanding lahir seorang putra yang tampan dan gagah yang diberi nama Pangeran Kuningan. Setelah dari Luragung, Syeh Syarif Hidayatullah dengan rombongan menuju tempat tinggal Ki Gendeng Kuningan di Windu Herang, dan menitipkan Pangeran Kuningan yang masih kecil kepada Ki Gendeng Kuningan agar disusui oleh istri Ki Gendeng Kuningan, karena pada waktu itu Ki Gendeng Kuningan mempunyai putera yang sebaya dengan Pangeran Kuningan namanya Amung Gegetuning Ati yang oleh Syeh Syarif Hidayatullah diganti namanya menjadi Pangeran Arya Kamuning serta beliau memberikan amanat bahwa kelak dimana Pangeran Kuningan sudah dewasa akan dinobatkan menjadi Adipati Kuningan. Setelah Pangeran Kuningan dan Pangeran Arya Kamuning tumbuh dewasa, diperkirakan tepatnya pada bulan Muharam tanggal 1 September 1498 Masehi, Pangeran Kuningan dilantik menjadi kepala pemerintahan dengan gelar Pangeran Arya Adipati Kuningan dan dibantu oleh Arya Kamuning. Maka sejak itulah dinyatakan sebagai titik tolak terbentuknya pemerintahan Kuningan yang selanjutnya ditetapkan menjadi tanggal hari jadi Kuningan.

B. Keadaan Geografis

Kabupaten Kuningan sebagian besar merupakan wilayah pegunungan yang letaknya di bagian timur Jawa Barat. Wilayah ini berada diantara $108^{\circ}20$ dan 108° Bujur Timur dan $6^{\circ}45$ dan $7^{\circ}13$ Lintang Selatan. Ibukota Kabupaten Kuningan adalah Kuningan.

Luas wilayah Kabupaten Kuningan adalah 1.117,95 km² yang secara administratif terdiri dari 32 Kecamatan dan 375 Desa. Batas-batas wilayah Kabupaten Kuningan adalah sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes (Jawa Tengah), sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ciamis.

Wilayah di bagian Utara merupakan daerah yang sangat subur sebagai pengaruh dari vulkan Gunung Ciremai, sedangkan sebagian kecilnya termasuk daerah yang kurang subur. Di wilayah bagian Selatan juga termasuk kurang subur. Di bagian Selatan ini terdapat bahan untuk membuat oker dan nikel di Kecamatan Kadugede.

C. Iklim dan Hidrologi

Kabupaten Kuningan beriklim tropis dan angin musim dengan temperatur bulanan berkisar antara 18°C sampai dengan 32°C serta curah hujan menunjukkan angka rata-rata 2000mm sampai dengan 4000mm pertahun di bagian Utara dan Timur. Jumlah sungai besar dan kecil termasuk anak sungainya ada 43 buah, yang telah dimanfaatkan untuk

kepentingan perikanan, irigasi dan pengairan sawah walaupun belum seluruhnya optimal karena masih di perlukan peningkatan teknik pengairannya. Sumber-sumber air yang dapat dipergunakan untuk irigasi dan air minum serta berfungsi untuk potensi pariwisata antara lain Waduk Darma, Darmaloka, Balong Cigugur, Cipari, Balong Dalem dan Telaga Remis.

D. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Kuningan tercatat sebesar 1.015.054 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 506.968 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 508.086 jiwa yang tersebar di 32 kecamatan dengan kepadatan secara keseluruhan 908 jiwa per km². Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir berimbang dengan sex ratio 99,78%.

Berikut ini adalah tingkat kepadatan penduduk yang tersebar di setiap kecamatan:

Tabel IV.1
Kepadatan Penduduk Kabupaten Kuningan
Menurut Jumlah Penduduk dan Luas Kecamatan
Tahun 2004

Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1. Darma	49,43	44.303	896
2. Kadugede	19,03	23.722	1.247
3. Nusa Herang	18,27	18592	1.018
4. Ciniro	48,26	18.839	390
5. Hantara	35,02	13.711	392
6. Selajambe	37,28	14.485	389
7. Subang	44,95	16.469	366
8. Cilebak	35,42	11.925	337
9. Ciwaru	72,03	27.485	382
10. Karangkencana	36,29	16.198	446
11. Cibingbin	72,77	34.028	468
12. Cibeureum	31,46	19.161	609
13. Luragung	43,28	36.144	835
14. Cimahi	52,45	36.411	694
15. Cidahu	33,89	39.757	1.173
16. Kalimanggis	20,47	22.836	1.116
17. Ciawigebang	61,36	78.147	1.274
18. Cicipung	18,37	26.397	1.437
19. Lebakwangi	19,95	38.384	1.924
20. Maleber	56,10	40.748	726
21. Garawangi	28,24	38.910	1.378
22. Sindangagung	12,49	31.906	2.555
23. Kuningan	28,01	78.437	2.800
24. Cigugur	27,77	39.448	1.421
25. Karamatmulya	18,42	45.557	2.473
26. Jalaksana	21,55	40.039	1.858
27. Japara	27,79	19.963	718
28. Cilimus	33,24	44.267	1.332
29. Cigandamekar	25,81	28.567	1.107
30. Mandirancan	37,00	23.977	648
31. Pancalang	18,13	23.293	1.285
32. Pasawahan	33,42	22.921	686
Kab. Kuningan	1.117,95	1.015.054	908

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan

Kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat adalah kecamatan Kuningan dengan kepadatan 2800 jiwa per km² dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan Cilebak dengan jumlah penduduk tercatat sebesar 337 jiwa per km².

1. Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja kabupaten Kuningan adalah 69.113 orang. Sebagian besar dari mereka yakni sebanyak 36.052 orang (52,17%) berpendidikan SD dan tidak tamat SD, disusul oleh lulusan SLTA sebanyak 16.783 orang (24,29%), lulusan SLTP sebanyak 13.707 orang (19,83%), lulusan Perguruan Tinggi 1431 orang (2,07%) dan lulusan Akademi (Sarjana Muda) sebanyak 1140 orang (1,65%). Dari 69.113 orang, sebanyak 1687 orang (2,44%) sudah ditempatkan bekerja yang tersebar pada berbagai sektor.

2. Kesehatan dan Keluarga Berencana

Pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah terhadap penduduk merupakan bagian pelayanan dari tugas pemerintah terhadap penduduk. Keseriusan pembangunan fasilitas kesehatan yang cukup dan memadai merupakan suatu wujud nyata dari pemerintah yang memperhatikan kesejahteraan rakyat.

Untuk mengendalikan jumlah penduduk di Kabupaten Kuningan, pemerintah juga menyelenggarakan program KB. Program ini dilaksanakan selain untuk menekan ledakan jumlah penduduk, juga dimaksudkan sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Hingga saat ini terdapat 198.649 pasangan usia subur (PUS), dan yang menjadi peserta KB aktif hanya 150.140 pasangan

(75,58%). Pasangan terbanyak ada di Kecamatan Ciawigebang sebanyak 10.979 pasangan, disusul Kecamatan Kuningan sebanyak 10.662 pasangan. Sebagian besar mereka menyukai KB suntik yaitu sebanyak 86.099 orang, kemudian Pil KB sebanyak 8.622 orang. Sedangkan alat KB yang relatif kecil digunakan yaitu Kondom sebanyak 97 orang.

Sedangkan jumlah keluarga berdasarkan stratifikasi kesejahteraan menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga berada pada tingkat Keluarga Sejahtera II sebanyak 158.673 keluarga. Kejadian ini dapat diindikasikan sebagai salah satu keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hanya saja yang masih perlu dapat perhatian besar adalah masih terdapatnya 14.564 keluarga yang tercatat sebagai keluarga pra sejahtera. Keluarga pra sejahtera inilah yang dapat dijadikan sasaran dalam pembangunan, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua keluarga.

E. Sosial

3. Pendidikan

Salah satu faktor penting kemajuan bangsa adalah memajukan tingkat pendidikan masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat suatu daerah, maka semakin tinggi kualitas SDM di daerah tersebut. Sampai saat ini pembangunan pendidikan di Kabupaten

Kuningan relatif terus membaik. Sarana pendidikan yang tersedia di Kabupaten Kuningan semakin meningkat.

Pada tingkat TK (Taman Kanak-kanak), jumlah sekolah yang tercatat sebanyak 148 unit sekolah yang terdiri dari 1 TK Negeri dan 147 TK Swasta. Dengan jumlah banyaknya guru yang mengajar yaitu sebanyak 7 orang di TK Negeri dan 354 orang di TK Swasta serta jumlah murid mencapai 59 orang di TK Negeri dan 4.543 orang di TK Swasta.

Pada tingkat SD, jumlah sekolah yang tercatat sebanyak 703 unit sekolah yang terdiri dari 699 SD Negeri dan 4 SD Swasta. Dengan jumlah banyaknya guru yang mengajar yaitu sebanyak 5.296 orang di SD Negeri dan 26 orang di SD Swasta serta jumlah murid yaitu 108.099 orang di SD Negeri dan 557 orang di SD Swasta.

Pada tingkat SLTP, jumlah sekolah yang tercatat sebanyak 72 unit sekolah yang terdiri dari 63 SLTP Negeri dan 9 SLTP Swasta. Dengan jumlah banyaknya guru yang mengajar yaitu sebanyak 1.803 orang di SLTP Negeri dan 126 orang di SLTP Swasta serta jumlah murid yaitu 32.158 orang di SLTP Negeri dan 1.095 orang di SLTP Swasta.

Pada tingkat SMU, jumlah sekolah yang tercatat sebanyak 25 unit sekolah yang terdiri dari 17 SMU Negeri dan 8 SMU Swasta. Dengan jumlah banyaknya guru yang mengajar yaitu sebanyak 650 orang di SMU Negeri dan 166 orang di SMU Swasta serta jumlah murid yaitu 10.688 orang di SMU Negeri dan 1.695 orang di SMU Swasta.

Untuk tingkat pendidikan menengah lainnya yakni SMK, jumlah sekolah yang tersedia yaitu 20 unit sekolah yang terdiri dari 4 SMK Negeri dan 16 SMK Swasta. Dengan jumlah banyaknya guru yang mengajar yaitu sebanyak 229 orang di SMK Negeri dan 534 di SMK Swasta serta jumlah murid yaitu 2.479 orang di SMK Negeri dan 79.655 orang di SMK Swasta.

Pada tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Kuningan menambah sarana tingkat pendidikan yang lebih tinggi yaitu Universitas Kuningan dengan jumlah dosen sebanyak 119 dosen tetap dan 84 dosen tidak tetap, dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dengan jumlah dosen sebanyak 11 dosen tetap dan 95 dosen tidak tetap. Jumlah mahasiswa masing-masing adalah 2145 mahasiswa dan 944 mahasiswa.

2. Agama

Penduduk Kabupaten Kuningan dapat dikatakan sebagai penduduk yang agamis. Ada lima macam agama yang resmi dianut oleh penduduk Kabupaten Kuningan yaitu Islam, Katolik, Protestan, Budha dan. Hindu Mayoritas penduduk Kabupaten Kuningan beragama Islam.

Urutan jumlah pemeluk agama di Kabupaten Kuningan pada tahun 2004 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2
Urutan Jumlah Pemeluk Agama
di Kabupaten Kuningan
Tahun 2004

Agama	Jumlah
Islam	1.006.131
Katolik	7.056
Protestan	1.068
Budha	444
Hindu	30
Total	1.015.054

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan

Ketersediaan sarana ibadah mutlak menjadi sangat dibutuhkan mengingat besarnya jumlah penduduk yang sangat berpegang teguh kepada ajarannya masing-masing. Pemerintah Kabupaten Kuningan telah mendirikan sejumlah sarana peribadatan bagi masing-masing agama untuk digunakan sebagai sarana peribadatan. Jumlah sarana peribadatan yang tersedia pada tahun 2004 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.3
Jumlah Sarana Peribadatan
di Kabupaten Kuningan
Tahun 2004

Sarana Peribadatan	Jumlah
Masjid	755
Langgar	3.864
Mushola	1.621
Gereja	10
Kelenteng	3
Kuil	1

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan

F. Industri

Industri di Kabupaten Kuningan secara keseluruhan belum dapat berkembang secara optimal. Selain jumlahnya yang masih sedikit, nilai investasi yang ditanamkan pemodal juga belum dapat dikatakan cukup

untuk menjadikan hasil bumi di Kabupaten Kuningan dapat dikembangkan menjadi agro industri. Minimnya nilai investasi di sektor industri membuat sektor industri belum dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal secara umum masih didominasi oleh industri di sub sektor makanan.

Jumlah industri besar dan sedang masing-masing 2 perusahaan dan 15 perusahaan, dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Kuningan yaitu 1 industri besar dan 5 industri kecil. Sedangkan untuk sektor industri rumah tangga dan industri kecil sub sektor makanan terdapat 521 perusahaan dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Kuningan sebanyak 112 perusahaan. Tetapi untuk sektor industri rumah tangga dan industri kecil komoditas bawang goreng terdapat 32 perusahaan dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Sindangagung sebanyak 19 perusahaan.

G. Keuangan

Realisasi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2005 mencapai Rp. 476.554.841.178,08 dengan bagian PAD sebesar Rp.31.148.897.878,52. Realisasi PAD terbanyak berasal dari retribusi daerah sebanyak Rp. 19.961.528.018. Sedangkan untuk besarnya pengeluaran pada tahun 2005 sebanyak Rp. 448.990.823.365, lebih kecil dari yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 459.336.729.286,56

BAB V

DESKRIPSI, ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang pasti diperoleh suatu daerah. Agar pembangunan terlaksana dengan lebih baik, pemerintah daerah harus lebih berupaya untuk meningkatkan PAD. Untuk melihat bagaimana kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya, kita harus melihat bagaimana kemampuan PAD itu sendiri. Besar kecilnya PAD suatu daerah menunjukkan seberapa besar daerah tersebut mampu membiayai dirinya sendiri. Seberapa besarkah PAD dibanding dengan Total Penerimaan Daerah yang diterima, apakah PAD mempunyai kontribusi yang cukup besar? Apakah pemungutan PAD sudah efisien? Apakah kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan sudah efektif? Dan apakah PAD tersebut mampu membiayai seluruh pengeluaran rutin daerah?

B. Analisis Data dan Pembahasan

1. Kemampuan PAD ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian (otonomi fiskal) menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat (Halim, 2004: 284). Rasio kemandirian (otonomi fiskal) dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah atau PAD dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah atau TPD (Reksohadiprodjo. 2001: 155). Semakin tinggi rasio kemandirian (otonomi fiskal), berarti ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak luar semakin rendah dan begitupun sebaliknya.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menghitung seberapa besar rata-rata kontribusi PAD terhadap TPD dengan menggunakan rasio kemandirian:

- a. Mengumpulkan data mengenai PAD dan TPD yang diperoleh dari Dipenda Kabupaten Kuningan tahun 2001-2005

Tabel V.1
Realisasi PAD dan TPD
Kabupaten Kuningan tahun 2001-2005
(dalam rupiah)

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi TPD
2001	12.094.998.147,42	279.379.160.399,08
2002	16.496.872.043,32	344.656.995.945,45
2003	20.481.406.384,72	410.284.841.378,56
2004	24.412.207.859,00	431.288.664.949,56
2005	31.148.897.878,52	476.554.841.178,08

Sumber: Dipenda Kabupaten Kuningan

- b. Melakukan analisis rasio kemandirian dengan cara membandingkan PAD dengan TPD dikalikan 100%. Berikut ini adalah

penghitungan dan hasil yang diperoleh dari analisis PAD terhadap TPD Kabupaten Kuningan tahun 2001-2005:

1. Tahun 2001

$$\begin{aligned} \text{Rasio kemandirian (\%)} &= \frac{PAD}{TPD} \times 100\% \\ &= \frac{12.094.998.147,42}{279.379.160.399,08} \times 100\% \\ &= 4,33\% \end{aligned}$$

2. Tahun 2002

$$\begin{aligned} &= \frac{16.496.872.043,32}{344.656.995.945,45} \times 100\% \\ &= 4,79\% \end{aligned}$$

3. Tahun 2003

$$\begin{aligned} &= \frac{20.481.406.348,72}{410.284.841.378,56} \times 100\% \\ &= 4,99\% \end{aligned}$$

4. Tahun 2004

$$\begin{aligned} &= \frac{24.412.207.859,00}{431.288.664.949,56} \times 100\% \\ &= 5,66\% \end{aligned}$$

5. Tahun 2005

$$\begin{aligned} &= \frac{31.148.897.878,52}{476.554.841.178,08} \times 100\% \\ &= 6,54\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan di atas dapat dilihat pada tabel V.2 berikut ini:

Tabel V.2
Kontribusi PAD terhadap TPD
Kabupaten Kuningan tahun 2001-2005
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Realisasi TPD	Rasio Kemandirian (%)
2001	12.094.998.147,42	279.379.160.399,08	4,33%
2002	16.496.872.043,32	344.656.995.945,45	4,79%
2003	20.481.406.384,72	410.284.841.378,56	4,99%
2004	24.412.207.859,00	431.288.664.949,56	5,66%
2005	31.148.897.878,52	476.554.841.178,08	6,54%
Rata-rata			5,26%

Sumber: Data diolah

c. Menarik Kesimpulan

Berdasarkan tabel V.2 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata rasio kemandirian adalah 5,26% dan dikategorikan sangat rendah karena berada dalam kisaran 0%-25%. Hal ini dikarenakan PAD yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan daerah yang berasal dari sumber lain. Atau bersifat instruktif yang berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah atau dapat dikatakan bahwa daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.

2. Kemampuan PAD ditinjau dari Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas

A. Rasio Efisiensi

Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk mengukur efisien tidaknya pemungutan PAD, dapat dilihat dari rasio yang dicapai yaitu apabila

rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100% maka pemungutan PAD dikategorikan efisien. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menghitung seberapa efisiennya rata-rata pemungutan PAD dengan menggunakan rasio efisiensi:

- a. Mengumpulkan data mengenai PAD dan biaya pemungutan PAD yang diperoleh dari Dipenda Kabupaten Kuningan tahun 2001-2005:

Tabel V.3
Realisasi PAD dan biaya pemungutan PAD
Kabupaten Kuningan tahun 2001-2005
(dalam rupiah)

Tahun	Biaya Pemungutan PAD	Realisasi PAD
2001	457.190.929,90	12.094.998.147,42
2002	550.995.526,10	16.496.872.043,22
2003	921.663.285,30	20.481.406.348,72
2004	1.242.581.380,00	24.412.207.859,00
2005	1.283.334.592,00	31.148.897.878,52

Sumber: Dipenda Kabupaten Kuningan

- b. Melakukan perhitungan rasio efisiensi dengan cara membandingkan biaya pemungutan PAD dengan realisasi PAD dikalikan 100%. Berikut ini adalah perhitungan dan hasil yang

diperoleh dari analisis biaya pemungutan terhadap PD Kabupaten

Kuningan tahun 2001-2005:

1. Tahun 2001

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{457.190.929,9}{12.094.998.147,42} \times 100\% \\ &= 3,78\% \end{aligned}$$

2. Tahun 2002

$$\begin{aligned} &= \frac{550.995.526,1}{16.496.872.043,22} \times 100\% \\ &= 3,34\% \end{aligned}$$

3. Tahun 2003

$$\begin{aligned} &= \frac{921.663.285,3}{20.481.406.348,72} \times 100\% \\ &= 4,50\% \end{aligned}$$

4. Tahun 2004

$$\begin{aligned} &= \frac{1.242.581.380}{24.412.207.859,00} \times 100\% \\ &= 5,09\% \end{aligned}$$

5. Tahun 2005

$$\begin{aligned} &= \frac{1.283.335.592}{31.148.897.878,52} \times 100\% \\ &= 4,12\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan di atas dapat dilihat pada tabel V.4 berikut ini:

Tabel V.4
Rasio Efisiensi pemungutan PAD
Kabupaten Kuningan tahun 2001-2005
(dalam rupiah)

Tahun	Biaya Pemungutan PAD	Realisasi PAD	Rasio Efisiensi(%)
2001	457.190.929,90	12.094.998.147,42	3,78%
2002	550.995.526,10	16.496.872.043,22	3,34%
2003	921.663.285,30	20.481.406.348,72	4,50%
2004	1.242.581.380,00	24.412.207.859,00	5,09%
2005	1.283.334.592,00	31.148.897.878,52	4,12%
Rata-rata			4,17%

Sumber: Data Diolah

c. Menarik Kesimpulan

Berdasarkan tabel V.4 diatas maka dapat ditarik kesimpulan:

Dilihat secara rata-rata dari kondisi setiap tahunnya maka pemungutan PAD di Kabupaten Kuningan dapat dikategorikan sangat efisien karena berada dalam kisaran kurang dari 60%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD sudah sangat baik, terbukti dengan jauh lebih kecilnya biaya pemungutan dibandingkan dengan realisasi PAD.

B. Rasio Efektivitas

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD berdasarkan target yang ditetapkan. Untuk mengukur efektif tidaknya pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya, dapat dilihat dari rasio yang dicapai yaitu apabila rasio yang

dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 %, sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menghitung seberapa besar rata-rata efektivitas pemungutan PAD:

- a. Mengumpulkan data mengenai realisasi PAD dan target PAD yang diperoleh dari Dipenda Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2001-2005

Tabel V.5
Realisasi dan Target PAD
Kabupaten Kuningan tahun 2001-2005
(dalam rupiah)

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD
2001	12.094.998.147,42	11.621.787.000,00
2002	16.496.872.043,32	15.342.038.685,00
2003	20.481.406.348,72	19.122.607.000,00
2004	24.412.207.859,00	24.947.354.910,00
2005	31.148.897.878,52	31.309.139.723,00

Sumber data : *DIPENDA Kabupaten Kuningan*

- b. melakukan analisis rasio efektivitas dengan cara membandingkan realisasi PAD dengan target PAD dikalikan 100%.

Berikut ini adalah perhitungan dan hasil yang diperoleh dari analisis realisasi PAD terhadap target PAD Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2001-2005:

1. Tahun 2001

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{12.094.998.147,42}{11.621.787.000,00} \times 100\% \\ &= 104,07\% \end{aligned}$$

2. Tahun 2002

$$\begin{aligned} &= \frac{16.496.872.043,32}{15.342.038.685,00} \times 100\% \\ &= 107,52\% \end{aligned}$$

3. Tahun 2003

$$\begin{aligned} &= \frac{20.481.406.348,72}{19.122.607.000,00} \times 100\% \\ &= 107,10\% \end{aligned}$$

4. Tahun 2004

$$\begin{aligned} &= \frac{24.412.207.859,00}{24.947.354.910,00} \times 100\% \\ &= 97,85\% \end{aligned}$$

5. Tahun 2005

$$\begin{aligned} &= \frac{31.148.897.878,52}{31.309.139.723,00} \times 100\% \\ &= 99,49\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan di atas dapat dilihat pada tabel V.6 berikut ini:

Tabel V.6
Rasio Efektivitas PAD
Kabupaten Kuningan tahun 2001-2005
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas (%)
2001	12.094.998.147,42	11.621.787.000,00	104,07%
2002	16.496.872.043,32	15.342.038.685,00	107,52%
2003	20.481.406.348,72	19.122.607.000,00	107,10%
2004	24.412.207.859,00	24.947.354.910,00	97,85%
2005	31.148.897.878,52	31.309.139.723,00	99,49%
Rata-rata			103,21%

Sumber: Data diolah

c. Menarik Kesimpulan:

Berdasarkan tabel V.6 di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Rasio Efektivitas pemungutan PAD di Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2001 – 2005 mengalami penurunan. Meskipun demikian, secara rata-rata pemungutan PAD tersebut dikategorikan sangat efektif karena berada dalam kisaran lebih dari 100%, yaitu mencapai 103,21 % pertahun anggaran.
2. Pada tahun anggaran 2001, rasio efektivitas mencapai 104,07 % yang berarti bahwa pada tahun anggaran tersebut, pemungutan PAD dikategorikan sangat efektif karena mencapai lebih dari 100 %. Pada tahun anggaran ini, PAD ditargetkan sebesar Rp. 11.621.787.000,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp. 12.094.998.147,42. Hal ini menunjukkan adanya kelebihan target sebesar Rp. 473.211.147,42.
3. Pada tahun anggaran 2002, rasio efektivitas mencapai 107,52 % yang berarti pada tahun tersebut ada peningkatan sebesar 3,45 % dari tahun

sebelumnya. Besarnya target PAD pada tahun 2002 sebesar Rp. 15.342.038.685,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp. 16.496.872.043,22 . Hal ini menunjukkan adanya kelebihan target sebesar Rp. 1.154.833.358,22. Dengan demikian pada tahun 2002, pemerintah Kabupaten Kuningan semakin efektif dalam menjalankan tugasnya karena besarnya realisasi PAD yang semakin meningkat.

4. Pada tahun 2003, rasio efektivitas mencapai 107,10 %, sedangkan pada tahun 2002 sebesar 107,53 %. Yang berarti ada penurunan sebesar 0,43 %. Pada tahun 2003, pemerintah menargetkan PAD sebesar Rp. 19.122.607.000,00 sementara besarnya realisasi mencapai Rp. 20.481.406.348,72. Hal ini menunjukkan adanya kelebihan target sebesar Rp. 1.358.799.348,72. Meskipun mengalami penurunan, pada tahun ini rasio efektivitas tetap dikategorikan sangat efektif karena lebih dari 100 %.
5. Pada tahun 2004, rasio efektivitas mencapai 97,85 %, sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar 107,10 %. Yang berarti ada penurunan sebesar 9,25 %. Pada tahun 2004, pemerintah menargetkan PAD sebesar Rp. 24.947.354.910,00 sementara besarnya realisasi mencapai Rp. 24.412.207.859,00. Hal ini menunjukkan adanya pungutan yang belum tertagih sebesar Rp. 535.147.051,00. Pada tahun ini rasio efektivitas dikategorikan efektif karena berada dalam kisaran antara 90-100 %.

6. Pada tahun 2005, rasio efektivitas kembali mengalami peningkatan. Pada tahun ini rasio efektivitas mencapai 99,49 %, sedangkan tahun sebelumnya hanya 97,85 %, yang berarti ada peningkatan sebesar 1,64 %. Pada tahun 2005, pemerintah menargetkan PAD sebesar Rp. 31.309.139.723,00 sementara realisasinya hanya mencapai Rp. 31.148.897.878,52. Hal ini menunjukkan adanya pungutan yang belum tertagih sebesar Rp. 160.241.844,48. Pada tahun ini rasio efektivitas dikategorikan efektif dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya semakin baik meskipun masih ada pungutan yang belum tertagih dengan total sebesar Rp. 695.388.895,48

3. Kemampuan PAD ditinjau dari peranannya dalam membiayai PRD

PAD merupakan salah satu modal dasar Pemerintah Daerah untuk mencukupi pengeluaran rutin daerah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat. Indikator rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dapat dilihat dari IKRD daerah tersebut.

Untuk mengetahui Indeks Kemampuan Rutin daerah digunakan rumus sebagai berikut:
$$IKRD = \frac{PAD}{PRD} \times 100\%$$

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menghitung seberapa besar kontribusi PAD terhadap PRD dengan menggunakan IKRD:

- a. Mengumpulkan data mengenai PAD dan PRD yang diperoleh dari Bapeda Kabupaten Kuningan tahun 2001-2005

Tabel V.7.
Realisasi PAD dan PRD
Kabupaten Kuningan tahun 2001-2005
(Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	PAD	PRD
2001	12.094.998.147,42	201.334.454.735,00
2002	16.496.872.043,22	250.589.668.305,61
2003	20.481.406.348,72	286.847.762.053,00
2004	24.412.207.859,00	313.486.449.218,00
2005	31.148.897.878,52	327.929.956.735,00

Sumber: BAPEDA Kabupaten Kuningan

- b. Melakukan perhitungan IKRD dengan cara membandingkan PAD dengan PRD dikalikan 100%. Berikut ini adalah perhitungan dan hasil yang diperoleh dari analisis PAD terhadap PRD Kabupaten Kuningan tahun 2001-2005:

1. Tahun 2001

$$\begin{aligned}
 \text{IKRD} &= \frac{\text{PAD}}{\text{PRD}} \times 100\% \\
 &= \frac{12.094.998.147,42}{201.334.454.735,00} \times 100\% \\
 &= 6,01\%
 \end{aligned}$$

2. Tahun 2002

$$\begin{aligned}
 &= \frac{6.496.872.043,22}{250.589.668.305,61} \times 100\% \\
 &= 6,58\%
 \end{aligned}$$

3. Tahun 2003

$$= \frac{20.481.406.348,72}{286.847.762.053,00} \times 100\%$$

$$= 7,14\%$$

4. Tahun 2004

$$= \frac{24.412.207.859,00}{313.486.449.218,00} \times 100\%$$

$$= 7,79\%$$

5. Tahun 2005

$$= \frac{31.148.897.878,52}{327.929.956.735,00} \times 100\%$$

$$= 9,49\%$$

Hasil perhitungan diatas dapat dilihat pada tabel V.8 berikut ini:

Tabel V.8
Kontribusi PAD terhadap PRD
Kabupaten Kuningan tahun 2001-2005
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	PAD	PRD	IKRD (%)
2001	12.094.998.147,42	201.334.454.735,00	6,01
2002	16.496.872.043,22	250.589.668.305,61	6,58
2003	20.481.406.348,72	286.847.762.053,00	7,14
2004	24.412.207.859,00	313.486.449.218,00	7,79
2005	31.148.897.878,52	327.929.956.735,00	9,49
Rata-rata			7,40

Sumber: data diolah

c. Menarik Kesimpulan

Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah secara mandiri, PAD Kabupaten Kuningan harus mampu membiayai seluruh pengeluaran rutin

daerah. Hasil penghitungan pada tabel V.8 menunjukkan bahwa Kabupaten Kuningan memiliki rata-rata PAD terhadap pengeluaran rutin sebesar 7,40% pertahun. Berarti PAD Kabupaten Kuningan secara rata-rata hanya mampu membiayai 7,40% dari keseluruhan pengeluaran rutin. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan belum mampu membiayai sebagian besar pengeluaran rutin daerah.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta data-data yang di peroleh dari Dipenda dan Bapeda Kabupaten Kuningan, dengan melalui perhitungan dan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan, keterbatasan dan saran sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Tingkat kemandirian kabupaten Kuningan dikategorikan sangat rendah, dengan pola hubungan instruktif yaitu dengan rata-rata rasio kemandirian sebesar 5,26%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kuningan tidak mampu menjalankan otonomi daerah dan sangat bergantung pada pemerintah pusat.
2. Efisiensi pemungutan PAD Kabupaten Kuningan rata-rata setiap tahunnya sudah dikategorikan efisien yaitu 4,17%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD sudah cukup baik.
3. Efektivitas pemungutan PAD Kabupaten Kuningan rata-rata setiap tahunnya sudah dikategorikan efektif yaitu 103,21%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD sudah baik.
4. Kemampuan PAD untuk menopang pengeluaran rutin masih sangat rendah yaitu rata-rata sebesar 7,40% pertahun dari keseluruhan

pengeluaran rutin. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan Kabupaten Kuningan terhadap Pemerintah Pusat.

5. Apabila dilihat secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak mampu melaksanakan otonomi daerah karena PAD Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak mampu untuk membiayai seluruh PRD dan sangat tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat (tidak mandiri).

B. KETERBATASAN PENELITIAN

Ada beberapa keterbatasan dalam mengadakan penelitian, yaitu:

1. Penelitian ini mempunyai ruang lingkup yang sangat terbatas yaitu hanya berlaku pada Pemerintah Daerah yang diteliti.
2. Belum adanya ukuran yang pasti mengenai batasan IKRD sehingga penulis menarik kesimpulan hanya berdasarkan pendapat bahwa Pemerintah Daerah dikatakan mandiri apabila PAD mampu membiayai seluruh pengeluaran rutin daerahnya.

C. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan penelitian berikutnya yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan harus lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membuka usaha-usaha baru. Birokrasi perizinannya tidak mempersulit pembukaan usaha. Diharapkan juga tidak adanya pungutan liar dalam memperlancar perijinan tersebut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan diharapkan mampu mempertahankan efisiensi dan efektivitas pemungutan PAD serta berusaha terus meningkatkannya. Cara yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efisiensi pemungutan PAD adalah dengan memperkecil biaya pemungutan yaitu dengan mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu dan dinilai terlalu besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdagri. 1997. *Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*
- Devas Nick, dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: UI-Press
- Dwiyanto, Agus. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. UGM
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: AMP YKPN
- Kaho, Josep Riwu. 1998. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara
- Kifliansyah, 2001. *Manajemen Fiskal Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Rangka Otonomi Daerah*. *Tesis-S2* (tidak dipublikasikan). Yogyakarta: Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan UGM
- Longdong, Debby Maria. 2004. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Yogyakarta. Universitas Sanata Dharma
- Marbun, B.N. 2005. *Otonomi Daerah 1945 – 2005 Proses dan Realita*. Edisi Baru. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Radianto, Elia. 1997. *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II (Suatu Studi di Maluku)*. *PRISMA Vol XXVI No 3*. Yogyakarta
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 2001. *Ekonomika Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: PT. BPFE
- Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, 2004, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika

Retnowati, Erlita. 2005. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma

Wajong, J. 1975. *Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Ichtiar

Yulianto, Muhammad. 2001. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Yogyakarta. *Tesis S-2* (tidak dipublikasikan). Yogyakarta: Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan UGM

LAMPIRAN

LAMPIRAN I: REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2001-2005
(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan Asli Daerah	Tahun Anggaran				
		2001	2002	2003	2004	2005
1	Pajak Daerah	2.547.919.621,00	3.225.724.237,00	4.836.001.931,00	5.599.165.637,00	6.216.767.238,00
2	Retribusi Daerah	8.892.178.869,00	11.876.478.423,00	13.716.739.247,00	17.151.927.865,00	19.961.528.018,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Hasil Perusahaan milik daerah	340.046.030,42	432.006.486,22	510.186.504,72	642.679.376,00	852.196.589,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	314.853.627,00	962.662.897,00	1.418.478.666,00	1.018.434.981,00	4.118.406.033,02
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	12.094.998.147,42	16.496.872.043,22	20.481.406.348,72	24.412.207.859,00	31.148.897.878,02

Sumber: *DIPENDA Kabupaten Kuningan*

LAMPIRAN II: REALISASI TOTAL PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2001-2005

(Dalam rupiah)

No.	Jenis Penerimaan	Tahun Anggaran				
		2001	2002	2003	2004	2005
1.	Bagian Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu	2.624.801.760,61	14.557.690.247,08	16.707.458.313,84	18.740.594.393,56	18.796.777.599,56
2.	Bagian Pendapatan Asli Daerah	12.094.998.147,42	16.496.872.043,22	20.481.406.348,72	24.412.207.859,00	31.148.897.878,52
2.1	Pajak Daerah	2.547.919.621,00	3.225.724.237,00	4.836.001.931,00	5.599.165.637,00	6.216.767.238,00
2.2	Retribusi Daerah	8.892.178.869,00	11.876.478.423,00	13.716.739.247,00	17.151.927.865,00	19.961.528.018,50
2.3	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Hasil Perusahaan milik Daerah	340.046.030,42	432.006.486,22	510.186.504,72	642.679.376,00	852.196.589,00
2.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	314.853.627,00	962.662.897,00	1.418.478.666,00	1.018.434.981,00	4.118.406.033,02
3.	Dana Perimbangan	219.641.614.704,05	271.760.052.895,15	338.753.885.276,00	359.115.691.705,00	395.330.165.700,00
3.1	Bagi Hasil Pajak	12.793.498.547,05	21.581.983.273,65	16.647.347.917,00	21.470.848.756,00	25.458.326.617,00
3.2	Bagi Hasil bukan Pajak	6.225.650.157,00	8.748.069.621,50	9.521.556.216,00	11.635.578.457,00	9.098.845.361,00
3.3	Dana Alokasi Umum	200.622.466.000,00	241.430.000.000,00	282.600.000.000,00	293.534.000.000,00	308.582.000.000,00
3.4	Dana Alokasi Khusus	-	-	7.800.000.000,00	7.420.000.000,00	13.530.000.000,00
3.5	Dana Darurat	-	-	7.000.000.000,00	-	-
3.6	Dana perimbangan dari Propinsi	-	-	-	-	-

3.7	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi			15.184.981.143,00	25.055.264.492,00	-
3.8	Bagi Hasil Pajak Propinsi	-	-	-	-	11.744.993.722,00
3.9	Bantuan Keuangan dari Propinsi	-	-	-	-	26.916.000.000,00
4.	Bagian Pinjaman Pemerintah Daerah	3.500.000.000,00	-	10.000.000.000,00	2.500.000.000,00	15.000.000.000,00
4.1	Pinjaman Dalam Negeri	3.500.000.000,00	-	10.000.000.000,00	2.500.000.000,00	15.000.000.000,00
4.2	Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	-	
5.	Bagian Lain-lain Pendapatan yang Sah	17.328.111.350,00	15.153.082.683,00	24.342.091.440,00	26.520.170.992,00	16.279.000.000,00
5.1	Lain-lain Pendapatan yang Sah	17.328.111.350,00	15.153.082.683,00	24.342.091.440,00	23.020.170.992,00	-
5.2	Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang		-	-	-	16.279.000.000,00
5.3	Dana Darurat		-	-	3.500.000.000,00	-
	Urusan Kas dan Perhitungan(UKP)	24.189.634.437,00	26.689.298.077,00	-	-	-
	JUMLAH	279.379.160.399,08	344.656.995.945,45	410.284.841.378,56	431.288.664.949,56	476.554.841.178,08

Sumber: BAPEDA Kabupaten Kuningan

LAMPIRAN III: TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2001-2005

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan Asli Daerah	Tahun Anggaran				
		2001	2002	2003	2004	2005
1	Pajak Daerah	2.408.000.000,00	2.624.900.000,00	4.160.000.000,00	5.342.250.000,00	6.184.930.000,00
2	Retribusi Daerah	8.797.587.000,00	11.725.427.650,00	13.593.908.000,00	17.509.407.910,00	20.241.989.700,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Hasil Perusahaan Milik Daerah	260.700.000,00	412.049.035,00	497.800.000,00	590.697.000,00	998.717.523,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	155.500.000,00	579.662.000,00	870.899.000,00	1.505.000.000,00	3.883.502.500,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	11.621.787.000,00	15.342.038.685,00	19.122.607.000,00	24.947.354.910,00	31.309.139.723,00

Sumber: DIPENDA Kabupaten Kuningan

LAMPIRAN IV: BIAYA PEMUNGUTAN PAD KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2001-2005
(dalam rupiah)

Biaya Pemungutan	Tahun Anggaran				
	2001	2002	2003	2004	2005
Insentif	147.559.533,30	209.186.367,00	306.059.755,30	460.196.941,00	461.774.175,00
Pendaftaran dan pendataan wajib pajak	9.026.100,00	10.221.240,00	-	-	-
Pemungutan Pajak	70.376.414,15	73.208.011,83	39.000.000,00	-	-
Penyampaian SPPT PBB	85.024.250,00	90.512.729,00	198.074.530,00	73.868.600,00	74.260.400,00
Biaya Pungut PBB	111.773.297,45	140.035.000,27	286.720.000,00	416.750.269,00	417.581.517,00
Dispensasi Penggunaan Jalan	6.250.000,00	7.870.000,00	-	-	-
Sewa Tanah Pasar	12.127.500,00	-	-	-	-
Operasional Staf pasar	6.993.835,00	-	-	-	-
Operasional makan petugas pajak/retribusi	8.060.000,00	9.137.000,00	-	-	-
Pemeriksaan PHR	-	900.000,00	-	-	-
Operasional PHR Linggarjati	-	8.000.000,00	-	-	-
Pemeriksaan Pajak Hiburan	-	1.215.000,00	-	-	-

Pengembalian Pajak Reklame	-	710.178,00	1.026.000,00	-	-
Pengembalian PHR kepada WP	-	-	38.865.000,00	-	-
Biaya Penelitian IMB	-	-	14.025.000,00	-	-
Biaya Penyuluhan IMB	-	-	816.000,00	-	-
Pemeliharaan dan pendataan basis data PBB	-	-	11.208.000,00	-	-
Pendaftaran calon wajib pajak	-	-	5.897.000,00	43.012.000,00	42.515.000,00
Pendataan wajib pajak	-	-	12.360.000,00	101.280.000,00	102.474.000,00
Penataan dan administrasi parkir	-	-	600.000,00	-	-
Operasional Pasar	-	-	7.012.000,00	11.274.000,00	-
Bantuan Keamanan Pasar	-	-	-	3.280.000,00	-
Pembinaan Petugas Pasar	-	-	-	13.009.290,00	-
Pemeriksaan Pemadam Kebakaran	-	-	-	5.510.000,00	-
Pembuatan Daftar Tunggakan Pajak	-	-	-	10.130.000,00	-
Pemanggilan WP yang belum bayar pajak	-	-	-	3.400.000,00	-
Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	59.205.000,00	60.018.000,00
Perhitungan Pajak Daerah	-	-	-	19.780.750,00	18.329.500,00

Pembinaan WP	-	-	-	8.074.530,00	9.400.000,00
Pengembalian ijin pemakaian tanah sempadan	-	-	-	3.120.000,00	-
Operasional Terminal	-	-	-	10.690.000,00	-
Pencatatan pajak daerah	-	-	-	-	10.705.000,00
Intensifikasi Retribusi Pasar	-	-	-	-	6.594.000,00
Intensifikasi PAD Pariwisata	-	-	-	-	2.700.000,00
Honorarium panitia Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	18.746.000,00
Evaluasi PAD	-	-	-	-	10.389.000,00
Pengkajian PAD	-	-	-	-	20.500.000,00
Monitoring Pajak	-	-	-	-	11.141.000,00
Penerbitan Surat Teguran Pajak	-	-	-	-	11.250.000,00
Pemanggilan WP yang belum bayar pajak	-	-	-	-	4.957.000,00
JUMLAH	457.190.929,90	550.995.526,10	921.663.285,30	1.242.581.380,00	1.283.334.592,00

Sumber: DIPENDA Kabupaten Kuningan

LAMPIRAN V: PENGELUARAN RUTIN DAERAH TAHUN 2001-2005

(dalam rupiah)

No.	keterangan Biaya	Tahun				
		2001	2002	2003	2004	2005
1	Belanja Pegawai	170.795.968.034,00	200.241.544.284,00	249.053.833.834,00	268.254.133.654,00	278.205.241.586,000
2	Belanja Barang	16.393.812.523,00	24.274.430.369,00	28.037.894.090,00	28.826.487.237,00	35.459.317.649,00
3	Belanja Pemeliharaan	2.616.680.105,00	3.963.573.923,00	6.028.727.629,00	7.060.342.527,00	10.716.216.500,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	917.410.000,00	2.341.957.500,00	3.727.306.500,00	9.345.485.800,00	3.549.181.000,00
5	Belanja Lain-lain	5.227.835.138,00	8.228.374.966,00	-	-	-
6	Angsuran Pinjaman dan Hutang dan bunga	217.908.350,00	3.805.285.850,81	-	-	-
7	Pensiunan dan onderstand	-	-	-	-	-
8	Bantuan Keuangan	2.259.326.585,00	2.737.768.421,00	-	-	-
9	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	2.472.150.000,00	4.359.741.603,00	-	-	-
10	Pengeluaran tidak tersangka	433.364.000,00	636.991.388,80	-	-	-
	JUMLAH	201.334.454.735,00	250.589.668.305,61	286.847.762.053,00	313.486.449.218,00	327.929.956.735,000

Sumber: BAPEDA Kabupaten Kuningan